

BAB II

CLUSTER WILAYAH HIERARKI PERKOTAAN DAN METODOLOGI KAJIAN

2.1 Cluster wilayah

Menurut (Sundari Mega, 2011) Cluster atau pengelompokan adalah teori mengenai serangkaian pengamatan pada himpunan bagian, cluster adalah suatu analisis statistika yang bertujuan untuk mengelompokkan data sedemikian sehingga data yang berada dalam kelompok yang sama mempunyai sifat yang relatif homogen dari pada data yang berada dalam kelompok yang berbeda.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Sehingga cluster wilayah adalah pengelompokan suatu kesatuan ruang geografis beserta unsur terkait yang memiliki kesamaan karakteristik diantara wilayah-wilayah tersebut. Kesamaan karakteristik meliputi aspek atau unsur yang terkait fisik maupun non fisik pada wilayah tersebut.

Faktor fisik dapat diperhatikan dari kondisi kenapakan alam maupun buatan yang nampak dipermukaan maupun tidak nampak seperti klimatologi, jenis tanah, morfologi dan sumber daya alam yang ada dalam lapisan-lapisan kulit bumi, faktor yang termasuk non fisik meliputi kondisi kependudukan, ekonomi, budaya dan politik serta hal-hal yang erat hubungannya dengan perilaku atau kebiasaan manusia.

2.1.1 Aspek fisik

Aspek fisik wilayah merupakan unsur yang secara tampak atau tidak tampak dipengaruhi oleh keadaan alam yang terdapat didalam ruang yang memiliki karakteristik khusus antar suatu ruang dengan ruang lain yang mempengaruhi kehidupan manusia yang terbentuk dari benda mati semisal gunung, udara dan air.

A. Curah Hujan

Curah hujan (mm) merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi menguap, tidak meresap dan tidak mengalir, curah hujan 1 (mm) adalah air hujan setinggi 1 mm yang jatuh (tertampung) pada suatu tempat yang datar seluas 1 m² dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap (Mulyono Dedi, 2014).

Intensitas hujan mengikuti ketinggian wilayah semakin tinggi suatu daerah curah hujan tinggi, di wilayah tropik pada umumnya hujan dihasilkan dari gerakan masa udara lembab bergerak ke atas, terjadinya gerakan keatas apabila atmosfer dalam kondisi tidak stabil, kondisi tidak stabil terjadi jika udara yang naik lembab. Hujan adalah butiran-butiran air yang dicurahkan dari atmosfer turun ke permukaan bumi

Curah hujan diukur dalam satuan harian, bulan, dan tahun. Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Bentuk medan atau topografi;
2. Arah lereng medan;
3. Arah angin yang sejajar dengan garis pantai; dan
4. Jarak perjalanan angin diatas medan datar.

B. Jenis Tanah

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menempati pada sebagian permukaan bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman, dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula (Sugiharyanto dan Khotimah, 2009 dalam Isa Darmawija, 1990:9)

Indonesia adalah negara kepulauan dengan daratan yang luas dengan jenis tanah yang berbeda-beda. Berikut ini adalah macam-macam / jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Subardja *et al.* 2014):

1. Tanah Humus adalah tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat.
2. Tanah Pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil
3. Tanah Aluvial / Endapan adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian.
4. Tanah podzolit adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah / dingin.

5. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi.
6. Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contoh : Kalimantan Barat dan Lampung.
7. Tanah mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Contoh : Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
8. Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Seperti di rawa Kalimantan, Papua dan Sumatera.

C. Kelerengan

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang horizontal dan pada umumnya dihitung dalam persen informasi spasial kelerengan mendeskripsikan kondisi permukaan lahan, seperti datar, landai, atau kemiringannya curam (Srirahayu, Sony Tilaar dan Rieneke, 2015). Kemiringan lereng ini berpedoman pada penyusunan rehabilitas lahan dan konservasi tanah sebagai berikut :

Tabel II. 1
Klasifikasi Kelerengan

No	Kelerengan (%)	Klasifikasi
1	0 – 8	Datar
2	8 – 15	Landai
3	15 -25	Agak Curam
4	25 – 40	Curam
5	>40	Sangat Curam

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41 tahun 2007

D. Daerah Rawan Bencana

Amanat Undang-undnag No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menekankan bahwa secara garis besar penyelenggaraan penataan ruang diharapkan (1) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu

mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (2) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (3) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam sehingga mengurangi dampak buruk bahaya tertentu (Tondobala Linda, 2011). Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupaun karena ulah manusia. Daerah rawan bencana alam terbagi beberapa macam yang masing masing memiliki penyebab yang berbeda beda tergantung kenapakan alam dan jenis aktivitas yang terjadi pada wilayah tersebut terbagi atas :

a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah rawan longsor

Tanah longsor adalah suatu proses perpindahan tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa karena dipengaruhi oleh suatu gaya gravitasi dengan gerakan berbentuk rotasi atau translasi, selain itu longsor juga diartikan sebagai proses erosi yang pengangkutanya dan pemindahan tanahnya terjadi pada volume besar (Nasiah dan Ichsan., 2014)

b. Kawasan rawan banjir

adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

E. Tata guna lahan

1) Tata guna lahan

Lahan berbeda dengan tanah. Istilah tanah lebih mengarahkan pada tubuh tanah (soil) dan materi tanah yang menekankan pada sifat fisik tanah secara kimiawi dan organik Parliindungan, Johanes. (2014) dalam sadyohutomo, (2006:6), sementara lahan adalah lebih dikaitkan dengan unsur pemanfaat/peruntukan/penggunaan dari bentang tanah dalam hal ini dipahami sebagai ruang. Penatagunaan lahan adalah upaya atau hasil upaya pemanfaatan penggunaan tanah yang rasional, dan serasi melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaata tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Parlindungan, Johan. (2014) dalam Sadyohutomo, (2006:46) Lahan adalah ruang fungsional yang diperuntukan untuk memwadhahi beragam penggunaan. Penggunaan lahan terbagi kepada 2 tempat pemanfaatan yang memiliki fungsi kegunaan tertentu sesuai kegiatan manusia yaitu pedesaan dan perkotaan :

1. Klasifikasilahan pedesaan

- Perkampungan, adalah kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat secara tetap yang meliputi bangunan dan pekarangannya.
- Industri, adalah kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi pengolahan bahanbahan bau menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
- Pertambangan, adalah kawasan yang dieksploitasi untuk pengambilan material bahantambang baik secara terbuka maupun tertutup.
- Persawahan, adalah kawasan pertanian yang terdiri dari petak-petak pematang dan digenangi air secara periodik, ditanami padi dan dapat pula diselingi tanaman palawija, tebu, tembakau dan tanaman semusim lainnya. Persawahan ini dapa diklasifikasikan lagi menjadi sawah beririgasi , sawan non-irigasi dan sawah pasang surut.
- Pertanian tanah kering semusim, adalah areal tanah pertanian yang tidak pernah dialiri air dan mayoritas ditanami tanaman umur pendek.
- Kebun, adalah areal tanah yang ditanami beberapa jenis tanaman keras.
- Perkebunan, adalah kawasan yang ditanami satu jenis tanaman keras.
- Padang, adalah kawasan yang hanyay ditumbuhi tanaman rendah, semak dan rumput.
- Hutan, adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tajuknya saling menutupi /bergesekan.
- Perairan darat, adalah areal tanah yang digenangi air tawar secara permanen, baik buatan maupun alami.
- Tanah terbuka, adalah kawasan yang tidak ditumbuhi tanaman dan tidak digarap karena tidak subur.

2. Penggunaan Lahan Perkotaan

Secara umum, pola penggunaan lahan perkotaan memiliki 3 ciri antara lain :

- Pemanfaatannya dengan intensitas yang tinggi yang disebabkan oleh populasi penduduk yang lebih tinggi dari kawasan pedesaan. Dengan demikian, dalam pasar investasi tingkat permintaan akan lahan juga tinggi dan nilai guna lahan kawasan perkotaan cenderung lebih tinggi pula.

- Adanya keterkaitan yang erat antar unit-unit penggunaan tanah.
- Ukuran unit-unit penggunaan lahan didominasi luasan yang relatif kecil. Hal ini sangat berbeda dengan kawasan pedesaan yang memungkinkan sebarang lahan yang luas memiliki satu fungsi yang sama sehingga cocok untuk kegiatan budi daya agraria.

Secara umum, klasifikasi penggunaan tanah pada kawasan perkotaan dapat dibagi menjadi 7 jenis, Parlindungan, Johanes. (2014) dalam *Sadyohutomo*, (2006: 72), antara lain :

- Perumahan, berupa kelompok rumah sebagai tempat tinggal lengkap dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- Perdagangan, berupa tempat transaksi barang dan jasa yang secara fisik berupa bangunan pasar, toko, pergudangan dan lain sebagainya.
- Industri, adalah kawasan untuk kegiatan proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
- Jasa, berupa kegiatan pelayanan perkantoran pemerintah, semi komersial, kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan.
- Taman, adalah kawasan yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik, hutan kota dan taman kota.
- Perairan, adalah areal genangan atau aliran air permanen atau musiman yang terjadi secara buatan dan alami.
- lahan kosong, berupa lahan yang tidak dimanfaatkan.

F. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian, berdasarkan Peraturan Presiden No.35 Tahun 2015 tentang Kerjasama pemerintah dengan badan usaha menjelaskan bahwasanya infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

a. Jaringan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Pembagian klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan memiliki persyaratan teknis jalan yang standar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) yang berlaku yang meliputi : Kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan perlengkapan, perlengkapan jalan, penggunaan jalan harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan. Berikut table klasifikasi jalan :

Tabel II. 2
Klasifikasi Jalan

No	Pembagian	Klasifikasi	Definisi
1	Menurut sistem	Sistem Jaringan Jalan Primer	sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yg berwujud pusat kegiatan.
		Sistem Jaringan Jalan Sekunder	sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
2	Menurut Fungsi	Jalan Arteri	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
		Jalan Kolektor	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
		Jalan Local	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
		Jalan Lingkungan	jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan ratarata rendah.
3	Menurut Status	Jalan Nasional	jalan arteri & jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
		Jalan Provinsi	jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
		Jalan Kabupaten	jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
		Jalan Kota	jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang

No	Pembagian	Klasifikasi	Definisi
			menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
		Jalan Desa	jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
4	Menurut kelas	Berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas jalan, dikelompokkan menjadi: - Kelas I - Kelas II - Kelas IIIA - Kelas IIIB - Kelas IIIC	Pengaturan berdasarkan dimensi dan berat muatan kendaraan.
		Berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan, dikelompokkan menjadi: - Jalan bebas hambatan - Jalan raya - Jalan sedang - Jalan kecil	- Pengaturan mengenai kelas jalan mengikuti peraturan LLAJ - Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi: # pengendalian jalan masuk # persimpangan sebidang # jumlah dan lebar lajur # ketersediaan median # pagar

Sumber: Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui berbagai jenis sarana dan prasarana permukiman seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 - 7, meliputi:

1. Sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah (angka 5):
 - a. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, pencegahan perambatan kebakaran, serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur;
 - b. Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; dan

- c. Jaringan saluran air hujan untuk pengatusan/drainase, dan pencegahan banjir setempat. Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.
- 2. Fasilitas penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan/perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan. Sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial-budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman dan pertamanan (angka 6).
- 3. Utilitas umum meliputi antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Fasilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat (angka 7).

2.1.2 Aspek Non Fisik

Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu oleh masyarakat, dimana masyarakat menjadi obyek. Aspek non fisik berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri aspek non fisik meliputi ;

A. Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilam, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi sosial dan budaya , ruang lingkup kependudukan meliputi (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015) :

- a. Penduduk
 - Penduduk adalah semua yang biasanya tinggal disuatu tempat atau rumah tangga 6 bulan dan lebih atau yang belum 6 bulan nemun berniat untuk menetap.
 - b. Masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat secara kontinu dan terkait dengan identitas.
1. Menurut kompisis penduduk terbagi menjadi 5 bagian yaitu :
 - a. Biologi : umur, jenis kelamin
 - b. Sosial : pendidikan, status
 - c. Ekonomi : jenis pekerjaan, lapangan ppekerjaan, tingkat pendapatan

- d. Geografi : tempat tinggal
- e. Budaya : agama, adat istiadat

2. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk disuatu daerah. Kependudukan disuatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk perkilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus :jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembilang dapat berupa jumlah seluruh penduduk diwilayah tersebut, atau bagian-bagian penduduk tertentu seperti : penduduk daerah perdesaan atau penduduk yang bekerja disektor pertanian, sedangkan sebagai penebut dapat berupa luas seluruh wilayah, luas daerah pertanian atau luas daerah perdesaan.

B. Sosial budaya

Kehidupan masyarakat dipandang sebagai satu sistem yaitu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan, kehidupan masyarakat tidak lepas dari aspek sosial budaya, sosial merupakan segala sesuatu yang beralian dengan sisitem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau kelompok orang yang didalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Budaya berarti cara atausikap hidup manusia dalam hubungannya secra timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang didalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa dan karya baik yang fisik material maupun yang prokologis.

2.2 Hierarki Perkotaan

Kota adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai kota, baik kecil, kotamadya maupun kota metropolitan. Selanjutnya Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada umumnya kota diartika sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi pemerintahan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang pentaan ruang disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi Perkotaan adalah

suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.

A. Pusat Kota

Dita hestuadiputri (2007) dalam Rondinelli (1978) Kota memiliki peran sebagai beban kegiatan perkotaan yang diberikan pada suatu kota yang dikaitkan dengan wilayah belakangnya (*hiterland*), peran suatu kota ditentukan oleh aksesibilitas terhadap wilayah belakangnya ini yang menjadikan suatu wilayah menjadi pusat kegiatan atau pusat kota. Kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang sebagian lahaya terbangun, dan perekonominya berdifat non pertanian, dilihat dalam lingkup wilayah mungkin hanya terdapat satu wilayah yang menjadi pusat pelayanan yang memiliki tingkat hierarki tertinggi, yang selanjutnya disebut sebagai pusat pelayanan (Adisasmita, 2006).

B. Faktor faktor timbulnya pusat pelayanan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu pusat-pusat pelayanan yaitu :

1. Faktor lokasi

Letak suatu wilayah yang straegis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi pusat pelayanan.

2. Faktor ketersediaan sumber daya

Ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pelayanan

3. Kekuatan aglomerasi

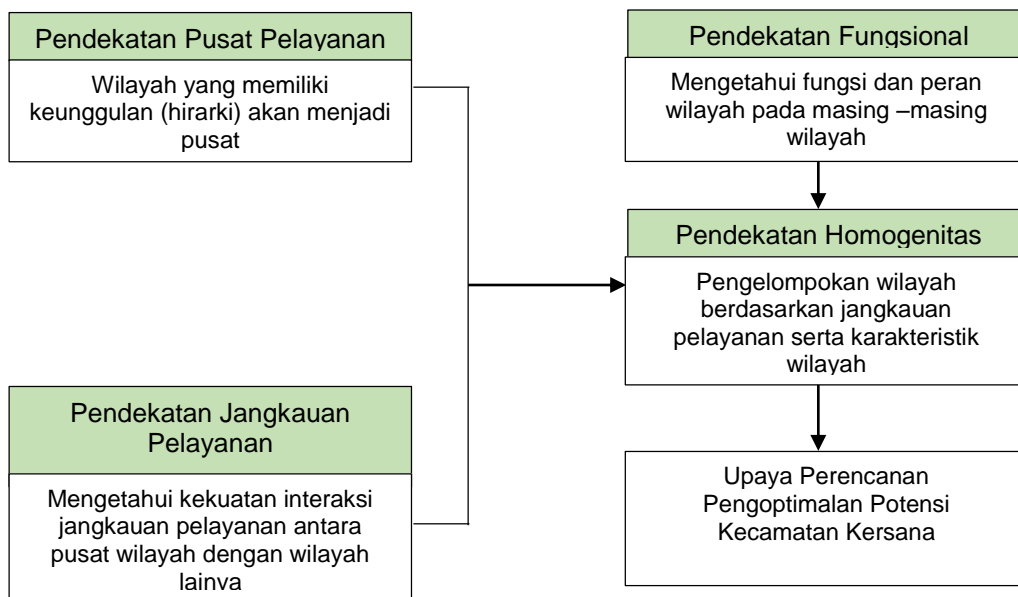
Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompokan pada suatu lokasi karena adanya suatu keuntungan yang selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat kegiatan.

4. Fakor investasi pemerintah

Kegiatan faktor diatas menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan secara ilmiah, sedangkann faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat (artificial)

a. Metodologi

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan wilayah (Homogenitas dan fungsional). Metode dalam pengumpulan data berupa metode pengumpulan data primer dan skunder, berikut uraian penjelasan metodologi dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 2. 1
Bagan Metodologi

Metode penelitian atau metodologi adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasa mengacu pada bentuk penelitian, mengacu pada bentuk penelitian, tujuan sifat masalah pendekatan menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri suatu fenomena. Metode ini dimulai mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.

1.3.1 Teknik Analisis

Teknik analisis aata adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah [masalah](#) tentang sebuah penelitian, atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan, berikut teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir :

1. Analisis Pusat Pelayanan

Indeks sentralitas marshal digunakan untuk memberikan bobot pada fasilitas yang ada. Dan digunakan untuk melihat kemampuan pelayanan suatu pusat ditinjau dari jumlah unit fasilitas yang terdapat pada pusat pelayanan (Purhatmanto, 2007), dengan analisis ini dapat ditentukan hirarki perkotaan. Untuk menentukan nilai sentralitas bobot dapat dihitung dari persamaan berikut rumus Indeks sentralitas marshal :

$$C = \frac{t}{T} \quad [1]$$

Keterangan :

C = Bobot dari atribut suatu variabel (fasilitas)

t = 100

T = Jumlah total setiap fasilitas

Setelah mengetahui pembobotan dalam masing-masing variabel, tahap selanjutnya mengitung nilai sentralitas untuk setiap variabel dengan rumus sebagai berikut :

$$N = F \times C \quad [2]$$

Keterangan :

N = Nilai Sentralitas

F = Jumlah Fasilitas setiap desa

C = Nilai Bobot

Setelah mengetahui nilai pembobot, kita dapat menentukan nilai sentralitas dengan mengalikanya dengan jumlah fasilitas yang ada dengan pembobot seperti rumus diatas, setelah mengetahui nilai sentralitas pada masing varibel setiap wilayah maka jumlah secara keseluruhan nilai sentralitas pada setiap wilayah, kemudian menentukan jumlah orde dengan menggunakan rumus (Endang Sri Utari, 2005) :

$$Jumlah\ Orde = 1 + 3,3 \log n \quad [3]$$

Keterangan :

n = Jumlah wilayah

Jumlah orde merupakan pembagian hirarki, setelah mengetahui jumlah orde perkotaan selanjutnya mencari masing-masing range orde. Perhitungan range orde dilakukan sebagai berikut :

$$Range = \frac{Nilai\ tertinggi - Nilai\ terendah}{Jumlah\ orde} \quad [4]$$

Setelah mengetahui range pada setiap orde dapat dikelompokkan nilai total sentralitas pada masing-masing wilayah berdasarkan tingkat orde yang telah ditetapkan.

2. Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat atau menilai hubungan antara daerah, dalam analisis ini daerah dianggap sebagai suatu massa, hubungan antara daerah disamakan dengan hubungan antar massa, massa wilayah ini diartikan daya tarik sehingga terjadi pengaruh antar wilayah. Model gravitasi diambil dari konsep fisika yang menyatakan daya tarik antar kutub magnet. Dalam analisis daerah, pengelompokan penduduk, pusat pelayanan menjadi daya tarik, dalam analisis model gravitasi akan didapatkan nilai kekuatan interaksi wilayah dengan menggunakan rumus perhitungan berikut rumus model gravitasi (Marno, 2012 melihat dari Stewart Isard, 1969):

$$I_{ab} = K \frac{(P_a \cdot P_b)}{D_{ab}^2} \quad [1]$$

Keterangan :

- I_{ab} = Kekuatan interaksi antara wilayah
- K = Konstanta (nilai, 1)
- P_a = Jumlah penduduk pada desa a
- P_b = Jumlah penduduk pada desa b
- D_{ab} = Jarak antar desa

Kekuatan interaksi wilayah akan menunjukkan tinggi rendah interaksi antar wilayah hal ini berkaitan dengan jangkauan pelayanan, dan jarak antar wilayah. Melihat lingkup kecamatan (yang terdiri dari 13 desa) mungkin hanya terdapat satu buah saja pusat pemerintahan desa yang memiliki tingkat hirarki tertinggi, yang selanjutnya dapat diidentifikasi sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Pusat-pusat pemerintahan desa lainya yang tingkat hirarkinya lebih rendah dan berorientasi sebagai pemasaran

barang dan mobilitas penduduk secara geografi ke DPP tersebut diberikan sebutan Desa Wilayah Pengaruh (DWP). Dalam penentuan dapat dilakukan perhitungan rata-rata jarak mengetahui Titik Henti, Metode titik henti dikembangkan dari model gravitasi, untuk menentukan lokasi paling optimal yang dapat dicapai dari dua lokasi.

$$J2 = \frac{Jab}{1 + \sqrt{\frac{Pa}{Pb}}} \quad [2]$$

Keterangan :

- J2 = Jarak titik henti diukur dari 2 titik wilayah
- Pa = Jumlah penduduk desa a
- Pb = Jumlah penduduk desa b
- Jab = Jarak antar desa a dan b

Model diterapkan dalam hubungannya dengan masalah interaksi wilayah, masalah perpindahan penduduk, masalah potensi penduduk, maupun masalah pemilihan lokasi. Dapat digunakan untuk merencanakan prasarana perhubungan untuk tempat-tempat dengan interaksi yang rendah dapat dikelompokkan dan dapat pula digunakan untuk merencanakan pusat-pusat pelayanan.

3. Analisis Fungsi Wilayah

Analisis fungsi dan peran yaitu analisis untuk mengetahui fungsi dari suatu wilayah, dalam penyusunan proyek akhir Identifikasi Wilayah Pengembangan Perencanaan Berdasarkan Pengelompokan Wilayah dan Hiriaki Perkotaan, untuk mengetahui fungsi dan peran pada wilayah studi Kecamatan Kersana baik fungsi dari sudut pandang kawasan yang berkaitan dengan kondisi aspek fisik alam dan fungsi wilayah dalam segi perekonomian melihat kondisi non fisik seperti aspek kegiatan ekonomi yang dominan pada wilayah studi, untuk mengetahui fungsi wilayah berdasarkan karakteristik alam, menggunakan analisis fungsi kawasan sehingga dapat diketahui bahwasanya wilayah tersebut memiliki fungsi sebagai peruntukan lindung, penyangga atau budidaya, sedangkan fungsi dalam segi perekonomian menggunakan data kondisi lapangan pada wilayah studi melihat dari kegiatan produksi perekonomian.

A. Analisis fungsi kawasan

Fungsi kawasan merupakan permintaan lahan berdasarkan karakteristik berupa kelerengan, jenis tanah dan curah hujan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”. Fungsi utama kawasan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk menopang keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap terjaga. Kawasan penyangga ini merupakan batas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang diperbolehkan hutan tanaman rakyat atau kebun dengan sistem wanatani dengan pengolahan lahan sangat minim. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan

Kalsifikasi fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Factor Kelerengan

Tabel II. 3
Faktor dan skoring Kelerengan

No	Kelas	Kelerengan (%)	Klasifikasi	Skor
1	I	0 – 8	Datar	20
2	II	8 – 15	Landai	40
3	III	15 -25	Agak Curam	60
4	IV	25 – 40	Curam	80
5	V	>40	Sangat Curam	100

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

Variabel kelerengan ini untuk mengetahui tingkat kemiringan sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan (relief), klsifikasi berdasarkan Permen PU dibagi menjadi 5 kelas yaitu datar, landai, agak curam, curam dan sangat curam berdasarkan tingkat kemiringan lereng, semakin tinggi kelerengan semakin tinggi pula tingkat kemiringan

hal ini berpotensi tinggi terjadinya erosi sebaliknya semakin rendah tingkat keterlerangan semakin rendah tingkat kemiringan dan rendah pula tingkat erosi yang bakal terjadi.

b. Factor Jenis Tanah

Tabel II. 4
Faktor Jenis Tanah dan Skoring

No	Kelas	Jenis Tanah	Klasifikasi	Skor
1	I	Aluvial, Glei, Planosol, Hidromoft, laterik air tanah.	Tidak Peka	15
2	II	Latosol.	Kurang Peka	30
3	III	Brown forest soil, non calcic brown mediteran, Kambisol.	Agak Peka	45
4	IV	Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Podsollic.	Peka	60
5	V	Regosol, Litosol, Organosol, Rensina.	Peka Sangat	75

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

Jenis tanah mempengaruhi tingkat erosi, berdasarkan klasifikasi jenis tanah terdapat 5 kelas dengan tingkat kepekaan terhadap erosi yang berbeda, semakin tinggi tingkat kepekaan semakin tinggi pula skor jenis tanah tersebut.

c. Factor Intensitas Curah Hujan

Tabel II. 5
Faktor Curah Hujan dan Skoring

No	Kelas	Intensitas Hujan (mm/hari)	Klasifikasi	Skor
1	I	0 – 13,6	Sangat rendah	10
2	II	13,6 – 20,7	Rendah	20
3	III	20,7 – 27,7	Sedang	30
4	IV	27,7 – 34,8	Tinggi	40
5	V	> 34,8	Sangat Tinggi	50

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

Intensitas curah hujan dipengaruhi oleh tingkat ketinggian suatu wilayah, terdapat 5 kelas dalam pembagian skor berdasarkan intensitas hujan, semakin tinggi nilai intensitas hujan pada suatu wilayah semakin tinggi pula tingkat erosi sehingga pembobotan pada

analisis fungsi kawasan memiliki nilai yang tinggi, skor bergantung dengan klasifikasi intensitas hujan.

- d. Skor Kreteria Penetapan Kawasan Lindung, Penyangga dan Budidaya.

Tabel II. 6
Skoring Fungsi Kawasan

No	Fungsi Kawasan	Total Skor
1	Kawasan Lindung	≥ 175
2	Kawasan Penyangga	125 – 174
3	Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan	< 124
4	Kawasan Tanaman Semusim dan Permukiman	< 124 dan lereng $< 8\%$

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007

Setelah skoring telah dilakukan akan menghasilkan skor total dimana skor total tersebut penjumlahan skor berdasarkan kelasifikasi tingkat skor setiap variabel, terdapat 4 kalsidikasi fungsi kawasan yaitu fungsi kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan dan kawasan tanaman semusim dan permukiman, hal ini tergantung dengan nilai total skor.

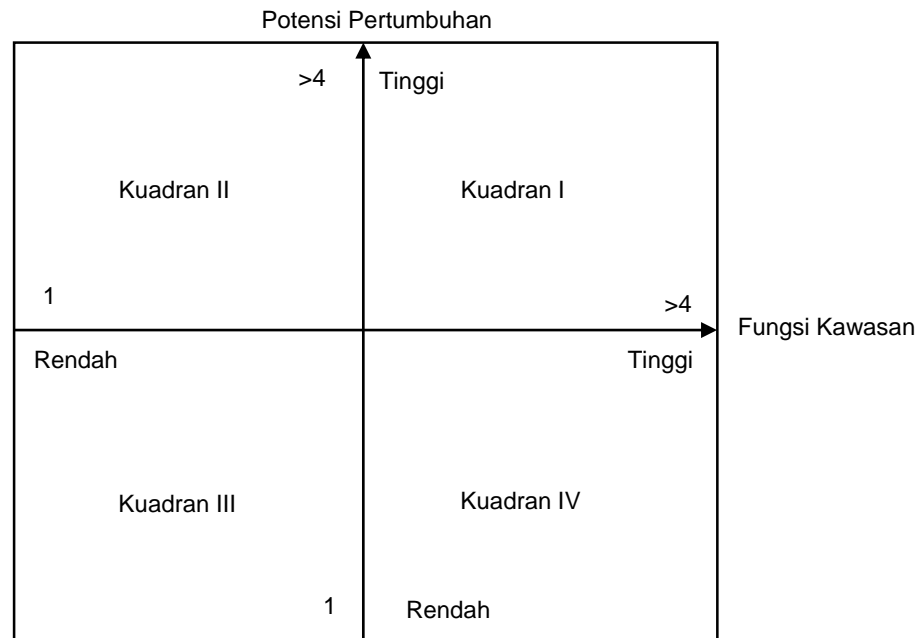
B. Identifikasi Kegiatan Perekonomian

Identifikasi kegiatan perekonomian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kegiatan perekonomian yang dominan dengan cara mendeskripsikan dan mengeksplorasi keadaan setiap desa pada wilayah studi dengan cara mengidentifikasi jenis berdasarkan data kegiatan lapangan.

4. Tipologi Desa

Pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*) meliputi banyak aspek dan tantangan yaitu menyakut dengan potensi sumber daya, prasarana dasar yang dibutuhkan, kelembagaan ekonomi, kelemahan dan keterbatasan, dan lainnya. Tipologi menggambarkan tipe atau pola, ataupun sebagai pencerminan model berdasarkan kemiripan atau keserupaan ciri-ciri dan potensi kondisi sumber daya alam, manusia dan buatan yang dimiliki oleh suatu desa, dapat pula dikaitkan dengan aspek topografi, kegiatan ekonomi yang dominan, kemampuan keswadayaan masyarakat dan yang lainnya, beberapa macam tipologi desa mengelompokan berdasarkan uraian tentang ciri dari aspek kegiatan menurut masing-masing tipologi desa (Adisasmita, 2006 :73).

Penentuan tipologi desa dalam penyusunan proyek akhir ini mengkaitkan antara potensi pertumbuhan dengan fungsi kawasan pada masing-masing desa wilayah studi dengan cara membuat kuadran yang meliputi kuadran I, II, III, IV (lihat Gambar 2.3).



Gambar 2. 2
Tipologi Desa Berdasarkan Potensi Pertumbuhan dan Fungsi Kawasan

Garis poros vertikal (menegak) menunjukkan tinggi rendahnya potensi pertumbuhan yang merupakan potensi pada desa wilayah studi, semakin keatas nilai potensi semakin tinggi, sedangkan semakin kebawah nilai potensi semakin rendah sama halnya pada fungsi kawasan semakin kekanan maka nilai semakin tinggi dan sebaliknya, dalam aspek potensi pertumbuhan melihat dari variabel fisik dan non fisik, aspek fisik meliputi variabel :

1. Penggunaan lahan, yaitu luas penggunaan lahan pertanian serta sarana perdagangan dan jasa
2. Persebaran industri

Kedua aspek tersebut diasumsikan apabila semakin luas penggunaan lahan baik pertanian maupun perdagangan dan jasa atau semakin tinggi jumlah persebaran industri pada suatu wilayah maka semakin besar pula potensi yang dapat dikembangkan, sedangkan pada aspek non fisik meliputi variabel :

1. Jumlah penduduk
2. Kegiatan ekonomi dominan,

Jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi dominan berkaitan dengan tenaga kerja serta aktivitas yang mungkin dapat berpengaruh dalam kegiatan produksi. Sedangkan garis poros horisontal (mendatar) menunjukkan keterangan fungsi kawasan, yang meliputi variabel :

- 1). Jenis tanah
- 2). Kelerengan
- 3). Curah hujan,

Variabel diatas diberikan skor berdasarkan rentang nilai pada masing-masing variabel yang akan dikelaskan menjadi tinggi, sedang, rendah berikut perhitungan interval kelas untuk membagi tingkatan tinggi rendahnya suatu potensi pertumbuhan dan fungsi kawasan pada masing-masing desa :

$$N = \frac{X - Y}{n} \quad [1]$$

Keterangan

- N = Nilai interval
 X = Nilai Tertinggi (pada masing-masing variabel)
 Y = Nilai Terendah (pada masing-masing variabel)
 n = Jumlah Kelas, bernilai 3 (tiga)

Perhitungan interval kelas dilakukan pada setiap variabel yang telah diketahui nilai pada masing-masing aspek potensi dan fungsi kawasan, "catatan, apabila nilai pada suatu variabel memiliki persamaan secara keseluruhan maka diberikan nilai skor 1, berikut tabel nilai skor dan keterangan untuk metode skoring variabel tipologi desa :

Tabel II. 7
Skor Penilaian Variabel

Nilai	Skor	Keterangan
X - Y	1	Rendah
Y - V	2	Sedang
V - N	3	Tinggi

Setelah melakukan skoring pada masing-masing variabel setiap desa maka akan diketahui tinggi rendahnya nilai pada masing-masing variabel, kemudian variabel dijumlahkan secara total, berikut tabel perhitungan skor total variabel :

Tabel II. 8
Perhitungan Skor Total Variabel

No	Nama Desa	Aspek Potensi Pertumbuhan				Fungsi Kawasan			Skor Total	
		Fisik		Non Fisik		Fisik				
		Penggunaan Lahan			Jumlah Penduduk	Kegiatan Dominan	Curah Hujan	Jenis Tanah		Kelerengan
		Pertanian	Sarana Perdagangan dan Jasa	Persebaran Industri						
Perhitungan	P	SP	PI	JP	KD	CH	JT	K	P+SP+PI+JP+KD+CH+JT+K	

Sumber : Analisis, 2018

Setelah mengetahui skor total pada masing-masing desa, kemudian klasifikasikan nilai berdasarkan besar/tinggi total skor nilai, dalam peletakan desa pada bagan kuadran maka semakin tinggi nilai akan terletak pada bagian atas sebelah kanan dan semakin rendah nilai akan terletak pada bawah kiri lihat (Gambar 2.2), dalam penentuan kuadran dilakukan dengan perhitungan interval kelas untuk mengetahui kelas pada skor total dan meletakkan desa pada masing-masing kuadran sesuai dengan klasifikasi rentang nilai, perhitungan sama halnya dengan perhitungan interval kelas untuk menentukan kelas pada masing-masing variabel namun nilai n diganti dengan nilai 4 dikarenakan pembagian kuadran terdapat 4 kuadran berikut rumus perhitungan :

$$N = \frac{X-Y}{n} \quad [2]$$

Keterangan

- N = Nilai interval
- X = Nilai Tertinggi (pada masing-masing variabel)
- Y = Nilai Terendah (pada masing-masing variabel)
- n = Jumlah Kelas, bernilai 4 (empat)

Setelah mengetahui kelas dengan perhitungan rentang nilai maka akan diketahui desa pada wilayah studi akan masuk pada kuadran I, II, III atau IV dengan klasifikasi nilai sesuai dengan hasil perhitungan, berikut klasifikasi keterangan kuadran :

Tabel II. 9
Klasifikasi Kuadaran

Skor	Kuadran	Keterangan
X – Y	Kuadran I	Tinggi
Y – V	Kuadran II	Sedang
V - N	Kuadran III	Rendah
N - M	Kuadran IV	Sangat Rendah

Apabila melihat pada Tabel II.9 Klasifikasi Kuadaran pada keterangan skor X-Y dan seterusnya merupakan nilai hasil perhitungan rentang nilai skor total pada masing-masing desa yang kemudian akan masuk dalam kuadran berapa dan klasifikasi keterangan tinggi atau rendah suatu potensi pertumbuhan pada masing-masing desa.

2.3.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan, sebagaimana metode pengumpulan data cara mendapatkan terbagi 2 sumber data yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data narasumber. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, diperoleh melalui :

- **Observasi**

Merupakan salah satu instrumen pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang diajukan terhadap obyek yang langsung menjadi sasaran penelitian, gunanya untuk memahami kondisi lokasi yang akan dikembangkan. Seperti kondisi sarana dan prasarana.

- **Dokumentasi**

Instrumen ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pembuktian dalam observasi lapangan

b) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder didapat dari instansi pemerintah pada Kabupaten Brebes yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, selain melalui instansi terkait pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui telaah dokumen dan telaah data dari kajian literature yang terkait dengan pembahasan penelitian sesuai wilayah studi. Data yang diperoleh sangat dibutuhkan untuk kegiatan analisis karena data sekunder adalah data pelengkap dari pengumpulan data primer di wilayah studi. Data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek kondisi fisik, kependudukan, penggunaan lahan, prasarana, sarana, perekonomian.

2.2.3 Kebutuhan Data

Tabel kebutuhan data merupakan tabel yang berisi tentang data apa saja yang dibutuhkan beserta cara mengumpulkan data tersebut. Tabel kebutuhan data dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan data yang disesuaikan dengan penelitian. Tabel kebutuhan data menjelaskan nama data, manfaat atau tujuan perencanaan data, unit data yang akan dicari, jenis data, bentuk data, tahun pembuatan data, sumber hingga alat yang digunakan untuk mendapatkan data

Tabel II. 10
Kebutuhan Data

No	Sasaran	Data	Variabel Data	Nama Data	Tujuan	Unit Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Sumber
1	Mengidentifikasi Karakteristik serta peran dan fungsi Wilayah	Fisik Alam	Curah Hujan	Intensitas Curah Hujan	Mengetahui Macam-Macam Tingkat Curah Hujan dan Persebaran Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2016	Bappeda
				Persebaran Intensitas Curah Hujan						
			Jennis Tanah	Jenis Tanah	Untuk Mengetahui Jenis Tanah dan Persebaran Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2016	Bappeda
				Persebaran Jenis Tanah						
			Kelerengan	Tingkat Kelerengan	Untuk Mengetahui Macam - Macam Kelas Lereng Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2016	Bappeda
				Persebaran Kelerengan						
			Rawan Bencana	Jenis Bencana	Mengetahui Jenis Bencana dan Persebaran Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2016	Bappeda
				Persebaran Jenis Bencana						
			Penggunaan Lahan	Tata Guna Lahan	Untuk Mengetahui Jenis Dan Luas Penggunaan Lahan di Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2016	Citra Satelit Google Earth
				Kondisi Penggunaan Lahan						
2	Mengidentifikasi Pusat Pelayanan	Infrastruktur	Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Mengetahui Jumlah dan Persebaran Sarana dan Prasarana Pada wilayah Studi	Kecamatan	skuder	Tabel	2016	BPS
				Persebaran sarana dan Prasarana						
				Kondisi Sarana dan Prasarana						
3	Mengidentifikasi Jangkauan Pelayanan	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Mengetahui Jumlah dan Persebaran Penduduk Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2017	BPS
				Persebaran Jumlah Penduduk						
			Kepadatan Penduduk	Tingkat kepadatan	Mengetahui Tingkat Kepadatan dan Persebaran Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Peta (Shapfile)	2017	BPS
				Persebaran Kepadatan Penduduk						
		Infrastruktur	Jaringan Jalan	Jarak antar wilayah Desa	Mengetahui Jarak Antar Desa Pada Wilayah Studi	Kecamatan	Skunder	Tabel	2018	Google Maps

Sumber : Analisis, 201

